



WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KETUA BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
OTONOMI KHUSUS PAPUA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK AHLI SEKRETARIS EKSEKUTIF BADAN PENGARAH  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
OTONOMI KHUSUS PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua, perlu diangkat Kelompok Ahli;  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua.

Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK AHLI SEKRETARIS EKSEKUTIF BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA.

KESATU : Mengangkat:  
1. Dr. Ahmad Suaedy  
2. Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, M.Sc.  
3. Prof. Dr. Masykuri Abdillah  
4. Maximus Tipagau

5. Dr. Melyana ...



WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Dr. Melyana Ratana Pugu
6. Drs. Moksen Idris Sirfefa
7. Marsekal Pertama TNI (Purn), Ir. Muhammad Johansyah, M.Eng., M.A.  
sebagai Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Percepatan  
Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam  
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk  
digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2023

KETUA BADAN PENGARAH PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA,

KH. MA'RUF AMIN